

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



DAMPAK GLOBALISASI DAN PERAN SOSOK KYAI DI SUMENEP
(Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kiyai di Sumenep, Madura)
- A Zahid -

**FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Kekerabatan Masyarakat
Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat
Melalui Ritual Keagamaan)**
- M. Syukri Nawir, dkk. -

**TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA
AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA
PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA**
- Ach. Aziz Faiz -

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember 2020

Editor in Chief

Moh Soehadha

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Zuly Qodir

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya, Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriyati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



Daftar isi

DAMPAK GLOBALISASI

DAN PERAN SOSOK Kiyai di SUMENEP (Kajian Kritis Anthony Giddens pada Peran Kiyai di Sumenep, Madura)

A Zahid.....141

FAMAJAL (Potret Tradisi Pengakuan Kekerabatan Masyarakat Kampung Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat Melalui Ritual Keagamaan)

M. Syukri Nawir, Muhamad Yusuf, Talabudin Umkabu,

M. Yasin. U.N. Mayalibit, Sulis Maryati159

TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA

Abd. Aziz Faiz179

PENGARUH SIKAP PROFAN TERHADAP PARADIGMA MASYARAKAT BERAGAMA PERSPEKTIF EMILE DURKHEIM

Nurul Khair197

JEMAAH MAHASISWA SALAFI DI MASJID POGUNG YOGYAKARTA

Arbi Mulya Sirait.....215

RELASI ELIT LOKAL DALAM KONFLIK KEAGAMAAN DI LOMBOK BARAT

Mohamad Baihaqi235

MODERASI RELASI LINTAS AGAMA TAU SAMAWA (ORANG SUMBAWA) BERBASIS KESEHARIAN DI TANA SUMBAWA

Yaspis Edgar N. Funay255

DERADIKALISASI KAUM REMAJA DALAM MEMBENDUNG RADIKALISME MEDIA SOSIAL

Mutrofin & Ahmad Kharis273

TRANSFORMASI KONFLIK BERNUANSA AGAMA DAN STRATEGI REFORMATIF PADA PEMBANGUNAN BUDAYA DAMAI DI INDONESIA

Abd. Aziz Faiz

UIN Sunan Kalijaga

abd.faiiz@uin-suka.ac.id



Abstrak

Konflik menyertai kehidupan keberagamaan di Indonesia. Interaksi sosial yang berdasarkan prejudice dan stereotip masih tumbuh subur dalam relasi sosial. Di sisi yang lain, bagi sebagian orang agama dilihat sebagai sumber patologis dalam konflik, bukan sebagai potensi kreativitas bagi pembangunan budaya damai. Dalam konteks itu, tulisan ini disusun melalui metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep kunci dan aplikasinya bagi upaya menemukan transformasi dan strategi reformatif dari konflik bernuansa agama. Transformasi dan strategi reformatif ini diletakkan dalam asumsi bahwa setiap budaya mempunyai media secara mandiri untuk membangun budaya damai melalui internal budaya masyarakat sebagai kekuatan rekonsiliasi yang efektif dalam membangun hubungan antar mazhab keagamaan dan kelompok sosial. Dari analisis ini ditemukan tiga konsep utama dan strateginya bagi pembangunan budaya damai; pertama, membuka kran komunikasi yang berbasis pada budaya yang ada dalam masyarakat, kedua, membangun budaya nasional reformatif-transformatif yang relevan bagi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Ketiga, Reformulasi paham dan interpretasi keagamaan sebagai ujung tombak *religious peace building*. Tiga hal tersebut memiliki signifikansi bagi upaya membangun basis pengambilan setiap kebijakan, transformasi sosial dan pembangunan budaya damai untuk mencapai *future harmony* bagi kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.

Kata kunci: agama, konflik, transformasi, budaya damai

Abstract

Conflict accompanies religious life in Indonesia. Social interactions based on prejudice and stereotype still thrive in social relations. On the other hand, for some people religion is seen as a pathological source of conflict, not as a potential creativity for the building of a peaceful culture. In that context, this paper is compiled through a descriptive qualitative method with literature study. This method is used to discover

key concepts and their application to efforts to find transformation and reformative strategies from religious conflicts. This transformation and reformative strategy is placed on the assumption that each culture has independent media to build a culture of peace through the internal culture of the community as an effective reconciliation force in building relationships between religious schools (mazhab) and social groups. From this analysis, three main concepts and strategies are found for the development of a culture of peace; first, opening the faucet of intercultural communication based on the existing culture in society, second, building a reformative-transformative national culture that is relevant to the needs of society and the current development. Third, the reformulation of religious understanding and interpretation as the spearhead of religious peace building. These three things have significance for efforts to build a basis for making every policy, social transformation and development of a peaceful culture to achieve future harmony for socio-religious life in Indonesia.

Keywords: religion, conflict, transformation, culture of peace



PENDAHULUAN

Konflik bagian dari *min lawazim al-hayah* atau kelaziman hidup (Abdullah, 2017). Pada perjalanan sejarah kehidupan manusia yang lebih kompleks, konflik pun banyak dibahas baik itu dalam kisah-kisah mitologi maupun dalam kitab-kitab suci. Tentu dengan berbagai bentuk dan kompleksitas yang berbeda-beda. Memasuki periode sebelum masehi pun konflik tercatat dalam sejarah, baik itu peperangan antar suku, kelompok, kerajaan bahkan agama telah banyak terjadi. Begitu juga ketika sudah memasuki abad-abad berikutnya sesudah masehi. Ada banyak konflik-konflik besar yang pernah terjadi dan tercatat sejarah, namun lebih banyak konflik-konflik lainnya yang tidak tercatat dan tidak terhitung pula jumlahnya. Hal ini karena konflik yang terdokumentasi hanya konflik yang terjadi di pusat-pusat kekuasaan.

Konflik bernuansa agama yang tak terlupakan dalam sejarah adalah perang salib. Konflik ini pun dampaknya sangat terasa hingga kini dan menjadi *horor stories* bagi hubungan antar pemeluk agama, khususnya Islam dan Kristen. Perang Agama di Eropa juga berlangsung lama. Konflik internal dalam beberapa agama juga banyak terjadi. Dalam Islam misalnya tercatat, ada khawarij, ada Sunni dan ada Syiah yang dulu terpecah karena persoalan politik dan berlanjut pada konflik teologi hingga saat ini. Begitu juga aliran-aliran kecil dalam Kristen, dalam Hindu, dan dalam agama-agama besar di dunia. Memasuki zaman modern, terjadi bermacam-macam konflik termasuk konflik politik, sosial hingga yang bernuansa agama.

Konflik-konflik dalam konteks Indonesia banyak mewarnai perjalanan bangsa, terutama setelah tumbanganya order baru baik itu konflik agama maupun yang berbau etnisitas. Konflik bernuansa agama terjadi dengan melibatkan antar pemeluk agama satu dengan yang lain (*inter-*

religious conflict) tetapi juga sering terjadi konflik antara umat dalam satu agama atau konflik intra agama (*intra-religiouse conflict*) seperti kasus Ahmadiyah, Sunni-Syi'ah di Sampang Madura (2012). Konflik yang terjadi baik itu intra maupun antar pemeluk agama terkadang melibatkan terminologi minoritas-mayoritas. Kenyataan lain misalnya tampak dari konflik Ambon (1999-2002), Poso (1998-2001), Sampit (2001), Lampung Selatan (2012). Pun begitu konflik Aceh, Timur-Timur, Papua yang sampai saat ini belum selesai, Kalimantan Barat, Jawa, termasuk konflik maluku mewarnai kehidupan berbangsa di Indonesia.

Data laporan tahunan Wahid Foundation tahun 2018, masih menunjukkan tingginya konflik bernuansa agama. Kasus tertinggi masih terjadi di DKI Jakarta dengan 32 Kasus, disusul Jawa Barat 26, Jawa Timur 17, Banten 16, Aceh 14, Jawa Tengah 13, Sumatera Utara 12, Sumatera Selatan 11, Jambi 8, dan Riau 7 kasus. (Wahid Foundation 2018) Angka-angka ini menunjukkan masih relatif tingginya konflik bernuansa agama dengan berbagai aktor, baik aktor yang datang dari ormas, perorangan, hingga negara.

Studi mengenai konflik bernuansa agama di Indonesia tidak banyak dilakukan pada aspek transformasi konflik dan upaya reformatifnya pada upaya budaya damai. Kalaupun ada, ia tidak membangun budaya damai dan resolusi konflik dalam konteks budaya sebagai basis utamanya. Kalaupun ada, memiliki posisi yang berbeda dengan tulisan ini. Beberapa tulisan itu antara lain: Tulisan Dewi Tika Lestari dan Yohanes Parihala berjudul *Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku*. Kajian ini melihat proses membangun dan merawat perdamaian di dalam konteks masyarakat majemuk dengan menganalisis konsep memori kolektif. Kajian ini menemukan bahwa ingatan bersama terhadap identitas budaya masyarakat Maluku sebagai orang basudara merupakan modal sosial yang kuat untuk mentransformasi konflik, dan merawat perdamaian. (Lestari and Parihala 2020) Tulisan ini tidak membahas bagaimana transformasi konflik ke budaya damai.

Tulisan lainnya adalah tulisan Aan Suryatwan dan Adis Imam Munandar berjudul *Transformasi Konflik dengan Pendekatan Mediasi pada Konflik Buton*. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana proses transformasi konflik dengan pendekatan mediasi pada konflik yang terjadi di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggambarkan bahwa transformasi konflik dengan pendekatan mediasi merupakan solusi yang sangat efektif atas konflik yang terjadi di Buton antar Desa Gunung Jaya dan Sampuobalo dengan melihat proses awal hingga akhir upaya penyelesaian konflik. (Suryatwan and Munandar 2020) Tulisan ini tidak membahas bagaimana konflik sendiri bisa ditransformasikan pada budaya damai yang lebih panjang dari sekadar proses mediasi non litigasi sebagaimana digambarkan dalam tulisan Aan dan Adis ini.

Kajian lain yang lebih dekat dengan tema tulisan ini adalah penelitian Anju Nofarof Hasudungan dan Sariyatun dkk, berjudul *Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku*. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya

untuk melihat transformasi konflik. Kearifan lokal Pela Gandong diletakkan sebagai fondasi dasar dalam melihat keberhasilan resolusi konflik yang khas dan berbeda dari resolusi konflik lembaga internasional. Meski demikian, kondisi Ambon yang digambarkan dalam penelitian ini masih dilihat sebagai wilayah yang memiliki kemungkinan bergejolak dan terjadinya segregasi. Dalam konteks yang demikian, Ambon masih berada dalam kondisi rentan (*peace vulnerabilities*) disebabkan oleh masih adanya kesenjangan perdamaian (*fulfilling the peace gaps*). Dalam konteks yang demikian tulisan ini menawarkan pendidikan perdamaian (*peace education*). (Hasudungan et al. 2020) Namun demikian, pendidikan damai yang diajarkan masih bersifat instrumentatif, tidak sebagai bangunan dasar budaya damai.

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, tulisan ini hadir bertujuan untuk melengkapi kajian yang sudah ada. Tulisan ini berusaha meletakkan konflik itu sendiri sebagai bagian terdalam dari aspek transformasi pembangunan damai, terutama dalam konteks Indonesia yang selama ini kental sekali dengan konflik bernuansa agama. Argumen dasar dari tulisan ini berangkat dari tiga asumsi penting. Pertama, konflik merupakan *basic element of human nature* yang selalu terjadi pada manusia. Kedua, konflik diciptakan oleh kondisi destruktif yang kemudian memanipulasi agama masuk di dalamnya. Ketiga, konflik dapat ditransformasikan kedalam pembentukan budaya damai yang berkelanjutan. Dalam tiga asumsi di atas, tulisan ini susun melalui metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk menemukan konsep-konsep kunci dan aplikasinya bagi upaya menemukan strategi reformatif dari konflik bernuansa agama di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konflik dan Agama di Indonesia

Mengenai kehidupan beragama di Indonesia, selalu ada gambaran-gambaran yang tampak bertentangan. Di satu sisi, Indonesia pasca 1998 dipuji sebagai suatu negara yang terbukti mampu mengupayakan demokrasi di tengah masyarakatnya yang memiliki tingkat religiositas tinggi. Dalam demokrasi itu ada banyak agama yang telah berakar kuat dalam sejarah Indonesia dan tetap aktif menunjukkan identitas keagamaannya di ruang publik. Di sisi lain, sulit juga dimungkiri bahwa ada banyak persoalan dalam hubungan antar komunitas agama, konflik-konflik yang berujung pada kekerasan, ditambah adanya berbagai kelemahan negara dalam menjamin kebebasan beragama, khususnya minoritas etnis maupun agama.

Kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan pluralitas etnis, agama, bahasa dan warna memang membahagiakan. Namun, di sisi yang lain hadirnya konflik juga tumbuh dari berbagai perbedaan keagamaan, etnis dan kepentingan-kepentingan regional dengan segala eskalasi dan tensinya yang berbeda-beda. Kenyataan ini misalnya tampak dari konflik Aceh, konflik Timur-Timur, konflik Papua, Kalimantan Barat, Jawa, termasuk konflik

Maluku mewarnai kehidupan berbangsa di Indonesia. Belakangan, Indonesia dikejutkan dengan meledaknya konflik yang disebabkan karena rumah ibadah seperti kasus GKI Yasmen, Gereja Philadelphia, termasuk konflik yang terjadi di Sampang Madura yang melibatkan Sunni dan Syi'ah.

Dalam konteks Indonesia, tampak konflik yang muncul, apapun basis dari konflik tersebut, budaya, kepentingan politik dan atau kepentingan ekonomi selalu saja ada "aroma" agama yang tak terpisah dan lekat di dalamnya. Agama selalu menjadi bagian yang bisa diidentifikasi dan dibaca dalam ruang-ruang konflik tersebut walaupun agama tidak menjadi "pemain utama". Konflik di berbagai daerah seperti di Poso dan Kalimantan misalnya, agama dipaksa hadir di dalamnya, seakan-akan konflik itu terasa kurang seru tanpa kehadiran agama.

Konflik bernuansa agama memiliki akar sejarahnya dalam konteks Indonesia. Di masa lalu, konflik berskala nasional dengan dasar politik dibungkus dengan kepentingan agama berkaitan dengan upaya pendirian negara agama. Hadirnya Darul Islam, Negara Islam Indonesia (NII), Komando Jihad hingga perlawanan pada komunis dibalut dengan agama. Semua itu membawa pada ruang dan pola pikir serta sentimen agama yang telanjur mewarnai atmosfer perjalanan bangsa Indonesia. Hal ini semakin diperkeruh dengan ekspansi salafisme dalam Islam yang juga pada akhirnya membawa suasana ruang publik negeri diwarnai dengan sweeping oleh ormas agama, pengafiran (takfiri) hingga aksi-kasi jalanan, mengatasnamakan diri sebagai kelompok beragama yang autentik dan benar.

Dalam berbagai persoalan itu, tampak agama selalu menjadi apa yang disebut dengan sub player. Agama sebagai sub player selalu dihadirkan sebagai stimulasi untuk menaikkan eskalasi. Dalam pengamatan penulis, konflik yang bernuansa agama tidak serta-merta agama yang menjadi basis atau penyebab terdalam dari sebuah konflik. Selalu, dalam konflik itu ada persoalan individu-individu terlebih dahulu yang kemudian ditarik ke ranah komunalitas. Contoh yang paling konkrit adalah konflik Situbondo yang dimulai dari pernyataan seorang takmir masjid bernama Shaleh, "ketika meninggal, Kyai As'asd Syamsul Arifin belum sempurna keislamannya". Rupanya ini membuat seorang kyai bernama Kyai Zaini tidak terima dan menuduh Shaleh sebagai seorang yang melecehkan tokoh agama. Konflik akhirnya diproses ke PC NU namun tidak selesai karena PC NU menganggap ini adalah persoalan yang tidak harus dibuat serius.

Proses di PC NU dianggap tidak memuaskan pihak penuntut hingga pada akhirnya dibawa ke pengadilan dan tidak memuaskan penuntut. Konflik ini akhirnya merambah pada pembakaran greja mewah, sekolah dan pengadilan. Hasil penelitian dari UGM menunjukkan bahwa konflik ini telah dibentuk (terkonstruksi) sekian lama melalui penetrasi ekonomi besar-besaran dengan kebijakan struktural yang berpihak pada kelas-kelas tertentu dan pendatang. Dalam konteks itu masyarakat Situbondo teralienasi dari rumahnya sendiri. Sehingga, ketika ada pemicu berupa pernyataan Saleh (individu), meledaklah konflik itu, gedung pengadilan pun, gereja, dan sekolah dibakar yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia. (Mas'od 2000;

147) Dalam konteks inilah tampak agama sebenarnya hanya menjadi sub player bukan penyebab berupa “daun kering” yang telah terkumpul sejak lama, hanya membutuhkan aktor kecil yang memetik korek api terbakarlah daun kering itu.

Contoh yang lebih dekat dari agama sebagai sub player adalah konflik Sunni Syiah di Sampang. Data dari Kementerian Agama Jawa Timur menyebutkan bahwa konflik Sampang diawali dari perselisihan keluarga antara Tajul Muluk (Syiah) dan adiknya Rois al Hukama' (Sunni). Mereka adalah kakak beradik yang sama-sama memiliki pengikut. Pada awalnya konflik ini jauh dari konflik aliran. Namun belakangan, menjadi konflik aliran dan melibatkan pengikut masing-masing. (Mahbub 2018, 93) Madura yang memang memiliki kultur keberagamaan konservatif Sunni pun terlibat secara lebih luas dengan mobilisasi dari berbagai tokoh-tokohnya.

Pertanyaan yang muncul, mengapa agama bisa ditarik ke ranah konflik? Walaupun agama hanya menjadi sub player namun mengapa ia bisa berada di dalamnya atau dalam lingkaran konflik dan menjadi bagian dari konflik? Tentu jawaban dari pertanyaan ini multi perspektif. Jawaban yang umum dan sifatnya sementara adalah karena agama dimanfaatkan oleh agen atau tokoh yang bertikai demi kepentingan-kepentingan tertentu. Jawaban ini memang bisa diterima meski agak klasik. Belakangan beberapa ahli mengajukan jawaban lain, bahwa agama bisa ditarik ke ranah konflik karena cara dan pemahaman beragama itu sendiri, ada eksklusifitas pemahaman (Syamsuddin 2020, 10) terutama pada mereka yang terdoktrin secara radikal berkaitan dengan agamanya (Dewantara 2019, 2) yang menyebabkan orang tidak lagi berfikir rasional dalam tindakannya.

Beberapa sosiolog juga berusaha memberikan jawaban lain atas keterlibatan agama dalam konflik. Mereka berpendapat bahwa agama bisa ditarik ke ranah konflik karena agama dijadikan identitas yang menyebabkan kesenjangan bagi pemeluknya. (Sukardi 2020, 65) Dalam konteks ini agama tidak lagi sebagai jalan hidup atau “way of life”. (Mulyadi 2019, 63) Asumsinya adalah bahwa setiap agama mengajarkan kelembutan, kedamaian dan keadilan yang harusnya menjadi nilai dan jalan hidup umat beragama, namun ketika agama menjadi identitas maka agama mudah termobilisasi dan pemeluknya pun mudah marah tatkala agama dan atau simbol keagamaannya terancam. Sudah barang tentu Jawaban-jawaban baru harus ditemukan dan dieksplor lebih jauh dalam berbagai kajian yang multidisiplin.

Konflik Bernuansa Agama dan Transformasi Sosial

Kehidupan keberagamaan di Indonesia timbul dan tenggelam dalam penggal-penggal ruang-waktu sejarah berjalan dari dulu hingga kini. Konflik kehidupan keberagamaan antar umat beragama, baik yang intra maupun antar agama, adalah bagian dari proses kehidupan manusia beragama. Meski demikian pihak keagamaan tidak boleh melihat semua itu sebagai tujuan dari kehidupan keagamaan. Konflik-konflik keagamaan adalah “bunga” bagi kehidupan

keberagamaan manusia Indonesia. Kesadaran bahwa konflik-konflik keagamaan merupakan bagian dari komunikasi religius antara ragam umat beragama selalu akan memberi “buah” atau hasil kehidupan keberagamaan yang lebih matang. (Roswantoro 2013; 6).

Memang, selama ini agama tampak –untuk tidak mengatakan selalu- diasumsikan dan di-image-kan mengandung dan menyimpan energi negatif. Ia bisa membawa pada kondisi destruktif dan tidak jarang menimbulkan banyak korban sehingga membawa pada kerugian bagi yang berkonflik. Buku Richard Moon berjudul *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*, (Richard Moon, n.d., 2018) membahas hal ini dengan baik. Agama oleh sebagian orang dilihat sebagai sumber konflik karena memiliki perbedaan doktrin dan sikap mental. (Yulida 2019, 6) Faktanya memang masih ada konflik-konflik bernuansa agama di Indonesia, bahkan sengaja dipelihara oleh kelompok kepentingan tertentu. Bentuknya bisa benturan langsung, pertarungan misi, dan perebutan pengikut. Salah satunya adalah kasus konflik komunal di Maluku tahun 1999–2000 yang bermula dari perselisihan pengemudi angkot, seorang Kristen Jacob Lauhery dengan Nursalim, Islam dari Batu Merah Bugis. Perselisihan ini pun berkembang menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). (Prasojo and Pabbajah 2020, 9)

Konflik dengan nuansa agama sebenarnya sebuah pertemuan bahkan batu loncatan bagi transformasi sosial. Konflik yang terjadi bisa dilihat sebagai bentuk dialog dan mengajarkan manusia akan orang-orang yang berbeda dengan dirinya, bahkan ia sedang berhadap-hadapan dengan dirinya dan menganggap dirinya juga berbeda dari yang lain. Jika selama ini kelompok yang bertikai hanya berpijak pada insider perspective maka dengan konflik yang dikelola dengan baik akan memberikan pemahaman bahwa ada outsider yang dua-duanya seharusnya saling berkomunikasi (dialogue). Meski demikian, untuk sampai pada pemahaman bahwa konflik bernuansa agama merupakan ruang negosiasi, memerlukan strategi kebudayaan yang berbasis pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Membangun transformasi konflik keagamaan dengan basis kebudayaan yang telah ada dan dimiliki masyarakat lebih mudah dan memungkinkan bertahan lama. Ada beberapa alasan utama, antara lain: Pertama, masyarakat hidup dalam kesadaran kebudayaannya sendiri. Kedua, budaya yang ada dalam masyarakat adalah proses panjang dari trial and error dari keseluruhan kehidupan masyarakat yang itu efektif dan bekerja bagi proses kehidupan mereka. Ketiga, pada dasarnya setiap budaya masyarakat memiliki kearifannya sendiri dan memiliki sistem untuk membangun dialog, negosiasi, dan strategi pada budaya dan atau etnis lainnya. Bahkan ia memiliki sistem dalam meresolusi persoalan yang muncul dan berkembang dari internal budaya mereka sendiri.

Benang merahnya adalah, selama ini basis kebudayaan sebagaimana disebutkan di atas, gagal disosialisasikan dan dimanfaatkan sebagai basis transformasi sosial dari konflik. Menurut penulis, seluruh komponen baik itu pemerintah, tokoh agama dan budaya bahkan lembaga pendidikan telah gagal dalam menyosialisasikan dan memperkenalkan dialog antar budaya ini. Beberapa analisis

kebudayaan mengemukakan bahwa situasi ini semakin membawa pada kondisi yang runyam tatkala kegagalan sosialisasi dan komunikasi antar budaya berada dalam situasi di mana globalisasi dengan berbagai teknologinya masuk ke ruang-ruang kehidupan masyarakat yang selama ini gagal dan belum siap berkomunikasi, akibatnya adalah menimbulkan kekagetan budaya (*cultural shock*). Hal ini semakin parah ketika media yang merupakan bagian dari globalisasi itu “hanya” mengeksplor berita yang sifatnya konfliktual. Ketika tidak ada komunikasi antar budaya maka yang hadir sebagaimana penulis kemukakan di atas adalah prasangka-prasangka budaya.

Dalam konteks sebagaimana disebutkan di atas, transformasi konflik bernuansa agama berbasis pada budaya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mengeksplor potensi transformasi yang ada dalam sistem kebudayaan masyarakat. Kalau Jawa memiliki *srawung*, maka dalam budaya orang Ambon, ada yang disebut dengan *pela gandong*. Konsepsi yang muncul dari budaya ini adalah bagian mendasar dari bagaimana komunikasi antar budaya etnis bahkan agama, dibangun. Kearifan lokal *Pela Gandong* misalnya telah berhasil menjadi media resolusi konflik Ambon dengan khas dan berbeda dari resolusi konflik lembaga internasional. Sehingga rekonsiliasi konflik Ambon dapat tercapai melalui Perjanjian Malino II pada 12 Februari 2002. (Hasudungan et al. 2020, 38)

Dalam budaya orang Suku Tolaki di Sulawesi ada kebudayaan yang disebut dengan *kalosara* adalah kearifan lokal mereka yang berfungsi sebagai media dalam etnopedagogi. Etnopedagogi didefinisikan sebagai model pembelajaran lintas-budaya. Konsep *kalo* dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkup dan maknanya. *Kalo* secara umum meliputi *o sara* (adat istiadat), khususnya *sara owoseno Tolaki* atau *sara Tolaki*, yaitu adat pokok (Instrumen utama), yang merupakan sumber dari segala adat-istiadat Orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. (Suardika, n.d., 211) *Kalosara* dalam konteks Tolaki adalah kearifan lokal yang menjadi sumber pembangunan budaya damai. Dalam konteks yang demikian, upacara dan tradisi dalam kebudayaan mempunyai fungsi efektif untuk membangun integrasi masyarakat yang majemuk. Namun hal ini semakin mengalami erosi seiring dengan berkembangnya ekonomi yang mengarah pada individualistik.

Kedua, transformasi melalui dialog antar budaya, terutama antar pemeluk agama. Sejatinya, budaya yang sudah melembaga itu adalah bentuk dialog yang sudah mengalami *trial and error* dalam kehidupan masyarakat. Transformasi konflik bernuansa agama dalam bentuk dialog budaya tidak berarti harus berhadap-hadapan, namun lebih kepada memanfaatkan basis kebudayaan untuk membangun sinergitas yang memungkinkan terjadi dialog di dalamnya. *Srawung* dalam menjaga keamanan RT/RW di poskamling misalnya akan menciptakan dialog antara masyarakat yang berbasis pada kebudayaan mereka sendiri. Bahkan permainan tradisional, seni dan tradisi yang hidup dalam masyarakat adalah sebetuk dialog itu sendiri, sebab di dalamnya ada kesadaran untuk bersama, ada bahagia bersama, dan ada pertemuan. Dialog yang demikian membuat relasi

atau hubungan yang murni dan sesungguhnya dengan menghadirkan sikap yang terbuka dan kesediaan mendengarkan yang lain. (Jufri 2019, 436)

Dialog keberagaman dalam konteks pertemuan langsung pun sudah barang tentu bisa dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dialog dan dikemas dengan nuansa kekeluargaan. Dalam konteks inilah dialog adalah kesediaan untuk saling mendengar bukan membuat persetujuan, inilah tujuan dialog yang pertama. Kedua adalah untuk lebih mengerti dan memahami diri kita dan keimanan kita sendiri dengan jelas. Dialog bukan perdebatan antara dua posisi misalnya Muslim dan Kristen, tetapi lebih pada pencarian kebenaran. Sehingga, saling mengerti pada sesuatu yang dianggap benar oleh orang lain dan begitu sebaliknya. Ketiga, adalah mutual understanding dan pentingnya bagi upaya transformasi sosial. Di dunia di mana kita hidup, cooperative transformation dari global dan budaya lokal begitu esensial untuk terus didialogkan. (Diana L Eck, n.d., 45–57)

Ketiga, transformasi konflik bernuansa agama dapat dilakukan dengan membuka jejaring dan ruang pertemuan budaya. Dalam bentuknya yang lebih konkret salah satunya adalah dilakukan dengan pembangunan yang tersambung dan tidak mengisolasi satu dengan yang lain. Tentu pembangunan ini harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan kearifan budaya mereka. Dengan demikian tercipta ruang-ruang pertemuan baru yang memungkinkan terjalinnya kontak antar budaya dalam masyarakat. Konkretnya, pasar misalnya tidak hanya dilihat sebagai tempat transaksi ekonomi, namun ruang pertemuan untuk saling menyapa. Banyak kasus ditemukan pernikahan antar etnis, budaya dan bahasa yang membawa pada perasaan terhubung satu dengan yang lain. Dalam konteks yang demikian transformasi konflik berbasis kebudayaan masyarakat terus terjadi sepanjang waktu.

Dalam tiga upaya transformasi konflik sebagaimana disebutkan di atas, konflik ditempatkan sebagai kekuatan kreativitas manusia untuk membangun persemaian yang subur bagi perubahan dan transformasi sosial yang lebih baik. Dengan pikiran yang demikian, membawa pada pemahaman manusia beragama bahwa konflik bukanlah racun kehidupan, melainkan “bunga” kehidupan. Pengalaman hidup manusia seakan memberitahukan bahwa racun itu membahayakan dan bahkan mematikan, sementara bunga yang bisa dilihat di taman, selain penuh warna, dalam proses selanjutnya akhirnya ia menjadi buah yang memberi kesenangan dan kebahagiaan bagi yang memanfaatkannya. (Roswanto 2013; 6)

Agama dengan basis budaya yang ada dalam masyarakat bisa memainkan diri sebagai penggerak transformasi sosial dari konflik untuk merangkai warna relasi kelompok keberagaman di Indonesia baik intra agama maupun antar pemeluk agama. Konflik selain dilihat sebagai sebetulnya negosiasi, dialog atas berbagai kepentingan, ia juga bisa menjadi basis transformasi sosial bagi rekonsiliasi atas berbagai kepentingan masyarakat yang terlibat konflik. Dengan demikian, agama tidak lagi ditarik menjadi sub player konflik, dan budaya, selain sebagai basis

transformasi, ia juga mampu memelihara proses transformasi sosial itu dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Konflik dan Strategi Reformatif Membangun Budaya Damai

Dalam analisis dan interpretasi terhadap berbagai konflik bernuansa agama ditemukan keterlibatan agama sangat kecil. Dalam berbagai laporan riset tampak bahwa agama bukan penyebab utama konflik, namun lebih banyak disebabkan oleh persoalan-persoalan politik, ekonomi dan sosial. (Oliver McTernan 2003, 77) Meski demikian, patut diakui bahwa dalam berbagai konflik di Indonesia, agama sering berada dalam lingkaran tersebut. Biasanya keterlibatan agama dalam konflik itu lebih banyak berperan sebagai alat mobilisasi dan legitimasi dalam proses terjadinya konflik, bukan sebagai basis dari konflik itu sendiri. Meski, ada berbagai paham keagamaan yang radikal (baca: radikalisme) bisa menjadi landasan berkembangnya sebuah konflik sebagai akibat dari pembacaan “yang salah” terhadap sejarah agama yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap doktrin agama pada masa tertentu. (Abdurahman Mas’ud, n.d., 2013:2)

Belakangan agama dituntut menghadirkan berbagai cara untuk membangun kondisi damai. Kondisi damai yang dimaksud bisa dibangun dalam situasi apapun termasuk dalam situasi di mana konflik itu akan terjadi, sedang terjadi atau telah terjadi. Kondisi damai dibangun atas dasar bahwa dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi konflik, manusia selalu terbuka -tanpa terkecuali- pada sentuhan cinta kasih dan kebutuhan perdamaian. Kebutuhan rasa damai telah banyak dijelaskan secara mendalam oleh seorang antropolog terkemuka yaitu Bronislaw Malinowski, bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa damai. (Marzali 2014, 38) Lebih lanjut Malinowski menjelaskan bahwa keberagaman manusia didasari juga pada kebutuhan rasa damai ini. Dalam konteks inilah, strategi membangun budaya damai menemukan titik pijaknya. Karena itu, menurut penulis harus disusun beberapa langkah-langkah berkelanjutan sebagai mana di bawah ini.

Pertama, reformatif dalam pengelolaan konflik dengan basis kebudayaan. Adanya konflik mengharuskan hadirnya manajemen konflik, atau pengelolaan konflik, penanganan konflik, advokasi konflik, *facilitating contexts*, resolusi konflik dan berbagai cara-cara lainnya. Celakanya selama ini konflik termasuk konflik keagamaan dilihat sebagai bagian dari patologi sosial. Dalam makna yang lebih kasar konflik dilihat sebagai “penyakit sosial” yang hadir dalam kehidupan masyarakat. Asumsi konflik sebagai patologi, mengharuskan mencari penyakitnya dan “mengamputasi”-nya sehingga konflik tidak terjadi lagi. (Susan 2019, 38) Maka langkah reformatifnya adalah dengan meletakkan konflik sebagai proses negosiasi untuk melahirkan pemahaman baru, pengertian dan penghormatan sebagai hasil dari transformasi yang diperoleh dari proses terjadinya konflik tersebut.

Berdasarkan perubahan pola dalam melihat konflik, maka konflik bisa menjadi pintu untuk membuka kembali komunikasi-komunikasi yang tertutup. Dalam konflik, pasti ada perbincangan, mencari tahu, mempelajari bahkan mendengar apa yang ada pada orang lain dan begitu juga sebaliknya. Karena itu, hadir yang namanya tata kelola konflik. (Susan 2019, 112). Dalam kasus konflik bernuansa agama yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan karena tersumbatnya komunikasi (Arifinsyah 2019, 2). Kebuntuan komunikasi ini menyebabkan prasangka-prasangka, prejudice, stereotip yang hadir dalam kehidupan sehari-hari antara masyarakat satu dengan yang lain. (Arifinsyah 2019, 6) Prasangka-prasangka ini adalah awal dari munculnya benturan yang lebih keras. Dengan demikian, konflik harus dilihat sebagai kesempatan membuka dialog, agar tidak bereskalasi, maka memerlukan pengelolaan konflik dengan cara pandang yang berbeda.

Pengelolaan konflik menjadi “jembatan” untuk membawa konflik pada transformasi yang baik dan mencegah benturan yang keras. Hadirnya manajemen konflik, baik itu dalam konflik yang belum terjadi, sedang terjadi dan sudah terjadi akan menjadi “batu loncatan” untuk membangun beberapa hal penting dalam konteks transformasi yang lebih luas kaitannya dengan kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Transformasi membawa konflik pada persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial. (Dean G. Fruitt and Jeffrey Z. Rubin, n.d., 2009:14) Perubahan sosial memang selalu didahului oleh pertemuan dengan budaya lain, atau dialog dengan elemen kebudayaan lainnya atau bisa saja karena proses sosial yang terus berubah dan menemukan dinamikanya dalam interaksi masyarakat, termasuk dalam konteks ini adalah konflik bernuansa agama.

Dengan pengelolaan yang baik, konflik menjadi awal dari fasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan. (Dean G. Fruitt and Jeffrey Z. Rubin, n.d., 2009:14) Prasangka-prasangka keagamaan yang selama ini bertebaran akan terkonfirmasi dengan sendirinya seiring berbagai pihak yang berkepentingan dalam konflik itu saling mengetahui persoalan masing-masing. Dalam berbagai konflik yang terjadi selama ini, jarang sekali memenangkan salah satu pihak (win-lose), namun selalu diusahakan untuk saling memberikan manfaat satu sama lain (win-win), sehingga lahirlah kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan semua orang. Dengan demikian, maka konflik hadir bahkan menjadi dasar dalam kehidupan bersama sebagai kekuatan dari lahirnya kreativitas masyarakat (Dean G. Fruitt and Jeffrey Z. Rubin, n.d., 2009:15) untuk hidup lebih dewasa dan memperkaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berkonflik.

Coser sebagaimana dikutip oleh Dean G. Fruitt mengatakan bahwa konflik dapat mempererat persatuan kelompok atau integrasi sosial. (Dean G. Fruitt and Jeffrey Z. Rubin, n.d., 2009:15) Dasarnya jelas bahwa konflik jika dikelola dengan baik dengan manajemen konflik, ia akan melahirkan kapasitas pada perubahan sosial dan rekonsiliasi atas berbagai kepentingan yang ada dalam konflik tersebut. Tanpa adanya kapasitas perubahan sosial atau rekonsiliasi atas kepentingan individu yang berbeda, maka transformasi pada solidaritas kelompok tampaknya

akan merosot dengan membawa serta efektivitas kelompok dan kenikmatan pengalaman kelompoknya sendiri. Hasil akhirnya sering kali berupa disintegrasi kelompok.

Kedua, membangun budaya nasional reformatif-transformatif yang relevan bagi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Budaya adalah jalan hidup yang ditransmisikan sepanjang waktu, mewujudkan dalam institusi komunitas, norma dan praktik-praktik yang diterima dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian dapat dipahami bagaimana kehidupan sosial dioperasikan. Budaya dilihat secara luas dalam world views yang mempengaruhi tindakan di mana sebuah komunitas sosial menggunakannya secara langsung sebagai metode untuk membentuk tingkah laku anggota-anggotanya. Dalam konteks ini budaya dilihat juga sebagai shared rules yang dapat membimbing tingkah laku anggota-anggotanya sekalipun tidak ada sebuah institusi yang memaksa untuk melakukan hal tersebut. (Marc Howard Ross, n.d., 1993:184) Dalam konteks pemahaman yang demikian, maka budaya dapat disusun untuk membangun sesuatu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Budaya yang reformatif-transformatif adalah langkah paling penting untuk membangun budaya damai yang pembangunannya harus berlandaskan pada kemanusiaan, keagamaan dan budaya Indonesia itu sendiri. Hal ini harus dilakukan secara integratif di berbagai sektor dan di berbagai level, karena itu dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dalam konteks ini di legislatif, yudikatif dan eksekutif, begitu juga tokoh agama, dan tokoh budaya atau etnis di setiap daerah. Dalam konteks ini sikap budaya (cultural attitude), sikap keagamaan (religious attitude) dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia (human rights) merupakan unsur yang sangat penting dalam menopang ajeg-nya kehidupan sosial masyarakat. (Dadang Kahmad, n.d., 2017:6)

Dalam konteks peran negara, maka langkah aplikasinya adalah dengan menegakkan aturan dan hukum nasional secara profesional. Peran negara juga mendidik masyarakat agar mempunyai budaya kepatuhan hukum secara nasional, seraya pemimpin nasional berusaha sebaik mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat untuk memperoleh makanan, rumah, air, keamanan serta memenuhi kebutuhan aspirasi mereka yang lebih tinggi seperti rasa keadilan, kejujuran dan kebebasan, otonomi, penentuan nasib sendiri dan kualitas hidup yang lebih baik, maka kedamaian akan dapat dicapai dan dapat pula dipertahankan. Dengan demikian tercipta struktur masyarakat intersected yang mendorong terciptanya integrasi (Ismail, n.d., 2019: 46)

Pemimpin agama dan tokoh-tokoh budaya atau tokoh etnis berperan dalam membangun kedewasaan bagi masyarakat. Karena itu, pertama, tokoh agama dan budaya berperan sebagai pendidik umat atau masyarakat yang dipimpinnya. Para pemimpin agama hadir digaris depan untuk selalu membangun kehidupan yang damai melalui khotbah-khotbah di masjid dan gereja atau di tempat-tempat ibadah agama lainnya. Kedua, Tokoh agama dan tokoh budaya ini ada di tengah-tengah masyarakat yang mengetahui secara langsung situasi dan apa yang diperbincangkan oleh masyarakat mereka. Jika situasi dan perbincangan masyarakat mengarah

pada konflik maka di saat yang bersamaan tokoh agama dan tokoh budaya bisa mengambil peran membuka kran komunikasi yang menjernihkan, sehingga kondisi dan perbincangan konfliktual itu tidak meledak menjadi eskalasi konflik yang destruktif.

Dalam membangun budaya yang reformatif-transformatif mengharuskan pula melibatkan pendidikan nasional. Tidak cukup jika hanya mengandalkan peran pemimpin nasional dalam negara, pemimpin agama dan tokoh budaya. Membangun sistem pendidikan yang lebih baik dan merombak bagian-bagian dari isi kurikulum yang sifatnya konfliktual menjadi pekerjaan yang mendesak untuk dilakukan. Paradigma pendidikan harus se-inklusif mungkin termasuk dalam pendidikan keberagaman dan kebudayaan. Maka mau tidak mau harus hadir paradigma pendidikan keberagaman yang multikultural yang memberikan pemahaman adanya keragaman ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan. Dalam konteks yang demikian maka pendidikan secara aktif telah membangun pemahaman keberagaman yang lebih inklusif-pluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantif dan aktif sosial. (Yaqin, 2005: 56-57)

Komponen lain yang sangat penting perannya dalam strategi budaya reformatif-transformatif demi perdamaian ini adalah media. Tidak boleh tidak harus “menyalakan lilin” perdamaian melalui media (peace journalism). Jurnalisme perdamaian ini tidak hanya sekadar melaporkan perdamaian (reporting peace) itu sendiri, namun yang paling esensi adalah tanggung jawab yang mendalam membangun wawasan pengetahuan mengenai perdamaian dan konflik. Jurnalisme perdamaian berisi sejumlah pengetahuan yang telah diobservasi tentang konflik, dinamikanya, dan potensinya untuk transformasi yang dibangun dalam konteks pekerjaan editing dan memberitaannya. (Jake Lynch and Annable McGoldrick, n.d., 243) Media dalam konteks ini menyajikan “cahaya lilin” (light candles) akan sebuah harapan bagi komunitas (Zaki Saritoprak, n.d., 183) dan masyarakat luas termasuk para pengikut agama. Media sangat berperan dalam membangun persepsi publik dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, reformulasi paham dan interpretasi keagamaan sebagai ujung tombak pembangunan dan pemeliharaan perdamaian (religious peace building). Agama adalah realitas paling dekat dalam kehidupan manusia. (Peter L Berger) Agama mampu menggerakkan manusia karena ia hidup di bagian terdalam dari manusia. Kata Berger agama berperan sebagai the secret canopy. (Kevin Nobel Kurniawan, n.d., 2020:270) Karena itu pemahaman manusia terhadap agamanya berpengaruh pada tindakan manusia karena agama juga berperan sebagai instrumen pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia itu sendiri. Selama ini, agama yang mempengaruhi tindakan manusia tampak masih bersifat teosentris atau pemahaman manusia pada agamanya yang berpusat pada Tuhan semata. Hal ini memerlukan reform dan interpretasi agama yang juga bersifat antroposentris, yaitu pemahaman

keagamaan yang berpusat pada manusia.

Interpretasi agama yang antroposentris selalu membangun benih-benih kebaikan, kemaslahatan, kemakmuran bagi seluruh umat manusia yang diturunkan dari sifat ketuhanan (teoantroposentris). Karena pada dasarnya agama hadir untuk membimbing manusia pada kemaslahatan hidup di mana ia menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam –misalnya– yang secara positif harus melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku, bangsa, ras, golongan dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Pendidikan dan pembinaan akhlak atau karakter yang baik dengan menghormati pada orang-orang yang berbeda dan keberagaman adalah komponen penting yang dapat dibina oleh agama. Dengan demikian agama hadir sebagai rahmah bagi seluruh alam dan isinya di mana perdamaian adalah syarat fundamental dan utama untuk menggapainya.

Langkah-langkah di atas tentu bersifat makro dan bercorak paradigmatis yang membutuhkan koreksi dan penyempurnaan untuk mentransformasikan konflik menjadi potensi kreativitas bagi pembangunan dan pemeliharaan budaya damai. Memang tidak mudah langkah-langkah tersebut di atas untuk dilakukan, namun tetap harus diusahakan. Karena itu, sebagaimana penulis kemukakan di atas bahwa perjuangan untuk membangun dan memelihara budaya damai adalah perjuangan sepanjang masa dan seumur hidup. Ia tidak hadir hanya ketika konflik itu melanda dan hadir dalam kehidupan manusia namun usaha membangun damai itu harus selalu hadir dalam setiap helaan napas manusia. Seluruh elemen dalam masyarakat memiliki peran dalam setiap langkah upaya ini, termasuk pemimpin agama dan pengikut agama itu sendiri. Mengutip pendapat Alim Ruswanto bahwa kekuatan-kekuatan dari luar seperti dari institusi-institusi politik memang penting, tetapi ini akan rapuh kalau tidak ada kesadaran dari dalam masyarakat beragama itu sendiri. (Roswanto, 2013)

PENUTUP

Konflik memang menjadi bagian dari kehidupan manusia beragama, namun ia bisa menjadi potensi kreativitas manusia beragama untuk membangun dan memelihara perdamaian. Konflik menjadi kekuatan kreativitas jika hadir pengelolaan konflik yang diarahkan bagi transformasikan konflik. Dengan demikian, konflik menjadi persembaan yang subur bagi transformasi sosial dan perdamaian. Sehingga konflik yang terjadi memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan masyarakat yang berkonflik. Dalam konteks ini konflik menjadi kekuatan yang dapat membawa manusia pada perbaikan hubungan yang lebih inklusif satu dengan yang lain.

Melakukan transformasi konflik dan membangun perdamaian memerlukan strategi jangka panjang yang integratif. Di antaranya adalah membangun relasi antar budaya, antar etnis, antar paham keagamaan dengan berbasis pada kebudayaan yang telah ada dan dimiliki oleh sistem budaya yang menginstitusikan dalam masyarakat. Setiap budaya mempunyai media mandiri bagi

transformasi sosial. Hal ini menjadi kekuatan rekonsiliasi yang efektif dalam membangun relasi karena meminimalisasi interaksi yang berdasar pada prasangka-prasangka dan stereotip. Selain itu, membangun budaya nasional yang reformatif-transformatif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Fondasi dasarnya adalah nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Reformulasi dan reinterpretasi paham keagamaan sebagai ujung tombak pembangunan dan pemeliharaan perdamaian (*religious peace building*). Pemahaman agama penting untuk membangun kesadaran akan budaya damai dari dalam pemeluk agama itu sendiri.

Visi strategi sebagaimana disebutkan di atas adalah *future harmony* di mana kondisi damai menjadi sesuatu yang tak terpisahkan bagi kebutuhan dasar manusia Indonesia. Tentu dalam kondisi ini bukan berarti konflik tidak akan ada dan musnah, namun ia menjadi sebetulnya kreativitas membangun kesadaran dari setiap kelompok dalam masyarakat bagi upaya transformasi sosial dimana budaya damai benar-benar melembaga dan memiliki nilai-nilai yang dapat dibagi (*share*) bersama dalam kehidupan sosial keberagaman di Indonesia. Tentu semua ini masih bersifat makro dan bercorak *paradigmatik* yang masih membutuhkan langkah-langkah teknis dan strategi turunannya yang lebih beragam sesuai dengan kondisi dan situasi. Dalam konteks yang demikian tulisan ini memerlukan penelitian-penelitian lapangan yang lebih strategis, mendalam, dan berkelanjutan.



Bibliografi

- Arifinsyah, Arifinsyah. 2019. "Analisis Deskriptif Peta Konflik Umat Beragama Di Sumatera Utara." *Jurnal Ushuluddin* 17 (1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/4869>.
- Dadang Kahmad. n.d. *Wawasan Agama Madani: Sebuah Keniscayaan Sosiologis Bangsa Majemuk*. 2017th ed. 2017. Jawa Barat: Majelis Pustaka & Informasi PW Muhammadiyah Jawa Barat.
- Dean G. Fruitt, and Jeffrey Z. Rubin. n.d. *Teori Konflik Sosial*. 2009th ed. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewantara, Agustinus Wisnu. 2019. "Radikalisme Agama Dalam Konteks Indonesia Yang Agamis Dan Berpancasila." *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 19 (1): 1–14. <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i1.222>.
- Diana L Eck. n.d. "Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism and Pluralism." In *Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace.*, 2005th ed. Burlington USA: Ashgate Publishing Company.
- Hasudungan, Anju Nofarof, Sariyatun Sariyatun, Hermanu Joebagio, and Lianda Dewi Sartika. 2020. "Transformasi Kearifan Lokal Pela Gandong Dari Resolusi Konflik Hingga Pendidikan Perdamaian di Maluku." *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 5 (1): 37–50. <https://doi.org/10.25217/jf.v5i1.784>.
- Ismail, n.d. *Konflik dan Kolaborasi: Peran Negara Dalam Integrasi Bangsa*. 2019th ed. Vol. 2019. 2019. Malang: MediaNusa Creative.
- Jake Lynch and Annable McGoldrick. n.d. "Peace Journalism." In *Handbook of Peace and Conflict Studies.*, 2007th ed. Vol. 2007. 2007. New York: Routledge.
- Jufri, Andi. 2019. "Islam dan Pluralitas Agama (Studi Analisis tentang Model Pendekatan dalam Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia)." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner* 4 (2): 428–51. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.959>.
- Kevin Nobel Kurniawan. n.d. *Kisah Sosiologi: Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi Manusia*. 2020th ed. Vol. 2020. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari, Dewi Tika, and Yohanes Parihala. 2020. "Merawat Damai Antar Umat Beragama Melalui Memori Kolektif Dan Identitas Kultural Masyarakat Maluku." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 3 (1): 43–54.
- Mahbub, Syukron. 2018. "Konflik Dan Kekerasan Sunni-Syiah Sampang Prespektif Kultur Kekerasan Dan Hak Asasi Manusia." *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 2 (1): 92–101.
- Marc Howard Ross. n.d. *The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*. 1993rd ed. Vol. 1993. New Haven and London: Yale University.

- Marzali, Amri. 2014. "Struktural-Fungsionalisme." *Antropologi Indonesia*, July. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3314>.
- Mulyadi, Mulyadi. 2019. "Pemerintahan, Demokrasi, Dan Interpretasi Agama Dalam Perspektif Abdul Karim Soroush." *Jurnal Filsafat* 29 (1): 49–65. <https://doi.org/10.22146/jf.34355>.
- Oliver McTernan. 2003. *Violence in God Name: Religion an Age of Conflict*. 2003rd ed. London: Longman and Todd ltd.
- Prasojo, Zaenuddin Hudi, and Mustaqim Pabbajah. 2020. "Akomodasi Kultural dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 5 (1). <https://doi.org/10.30984/ajip.v5i1.1131>.
- Richard Moon. n.d. *Putting Faith in Hate: When Religion Is the Source or Target of Hate Speech*. 2018th ed. Vol. 2018. Cambridge: Cambridge University Press.
- Suardika, I Ketut. n.d. "Kalosara di Kalangan Masyarakat Tolaki di Sulawesi Tenggara" 32, Nomor 1, Mei 2017: 11.
- Sukardi, Y. M. Imanuel. 2020. "Sinyalemen Kesenjangan Religiositas Spiritualitas Dalam Pergulatan Identitas Masyarakat Agamis." *Jurnal Teologi Gracia Deo* 2 (2): 62–69.
- Suryatwan, Aan, and Adis Imam Munandar. 2020. "Transformasi Konflik Dengan Pendekatan Mediasi Pada Konflik Buton." *Journal Publicuho* 3 (2): 205–16. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12324>.
- Susan, Novri. 2019. *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis*. Surabaya. Kencana.
- Syamsuddin, Akbar. 2020. "Konflik Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Agama." *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* 6 (1). <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alدين/article/view/865>.
- Wahid Foundation. 2018. *Membatasi Para Pelanggar; Laporan Tahunan Kemerdekaan Agama Berkeyakinan Wahid Foundation 2018*. Wahid Foundation.
- Yulida, Louisa Sharon Ghea. 2019. "Agama Sebagai Salah Satu Faktor Konflik Sosial dan Kritik Agama yang Bersifat Radikal Positif," June. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fe4c9>.
- Zaki Saritoprak. n.d. "Fethullah Gulen's Theology of Peacebuilding." In *Islam and Peacebuliding: Gulen Movement Initiatives*, 2010th ed. New York: Blue Dome Press.

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

